

Hubungan islam dan barat: Benturan atau kerjasama

Trisia Megawati Kusuma Dewi ^{1*}

¹ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta

* Korespondensi: trisia.megawati@upnvj.co.id

Received Date: December 22, 2023

Revised Date: January 18, 2024

Accepted Date: January 25, 2024

Cite This Article:

Dewi, T. M. K. I. (2024). Hubungan Islam dan Barat: benturan atau kerjasama. *The Journal of Religion and Communication Studies*, 1(1), 13-21. <https://doi.org/10.61511/jorcs.v1i1.2024.521>

Abstract

The Saudi Arabia-Iran reconciliation initiated by China has implications for the role of the United States (US) in the conflict. Saudi Arabia is beginning to see China as a rising power, while the U.S. is facing geopolitical shifts in the Middle East. The economic proximity between Saudi Arabia and China reduces Saudi Arabia's dependence on the US. The US should acknowledge the changing power dynamics and consider China's position in its policy regarding the Saudi Arabia-Iran conflict. This reconciliation requires the US to adapt to geopolitical power shifts and face new challenges in the region. Meanwhile, Saudi Arabia began to focus on revamping priority aspects with the shift of oil energy as a mainstay to green energy with the implementation of Vision 2030.

Keywords: conflict reconciliation; China; geopolitics; Iran; middle east; United States; Saudi Arabia; vision 2030



Copyright: © 2023 by the authors.
Submitted for possible open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

Abstrak

Rekonsiliasi Arab Saudi-Iran yang diinisiasi oleh China memiliki implikasi terhadap peran Amerika Serikat (AS) dalam konflik tersebut. Arab Saudi mulai melihat China sebagai kekuatan yang meningkat, sementara AS menghadapi pergeseran geopolitik di Timur Tengah. Kedekatan ekonomi antara Arab Saudi dan China mengurangi ketergantungan Arab Saudi pada AS. AS harus mengakui perubahan dinamika kekuatan dan mempertimbangkan posisi China dalam kebijakannya terkait konflik Arab Saudi-Iran. Rekonsiliasi ini mengharuskan AS untuk beradaptasi dengan pergeseran kekuatan geopolitik dan menghadapi tantangan baru di kawasan tersebut. Sementara Arab Saudi mulai fokus pada pembenahan aspek prioritas dengan pergeseran energi minyak sebagai andalan menjadi energi hijau dengan implementasi Vision 2030.

Kata Kunci: Amerika Serikat; Arab Saudi; China; geopolitik; Iran; rekonsiliasi konflik; Timur Tengah; vision 2030

1. Pendahuluan

Perdamaian antar negara di dunia merupakan impian banyak negara, hanya saja pada implementasinya tidak mudah. Seperti pepatah latin yang mengatakan “Si vis pacem, para bellum”, yang maknanya Jika kau mendambakan perdamaian maka bersiap-siaplah menghadapi perang. Situasi damai ternyata tidak mudah untuk diwujudkan, apalagi dalam konteks perdamaian dunia.

Prof Masykuri Abdillah dalam bukunya Islam Agama Kedamaian menjelaskan kata salam (damai) menurut Mu'jam al-Lughah al-Arabbiyah al-Mu'ashirah berarti (1) salah satu nama dari nama-nama Allah karena keselamatan-Nya dari ketidaksempurnaan, kecacatan, dan kekuasaannya yang luas, (2) ketika damai terjadi di antara orang-orang, hal itu berarti ketenangan, kedamaian, jaminan, dan tidak ada pengungsian karena perang, juga kondisi damai setelah perang yang mengerikan (Abdillah, 2021).

Pemilihan Xi Jinping untuk periode ketiga sebagai presiden China dan peran pentingnya dalam mediasi rekonsiliasi antara Arab Saudi dan Iran di Beijing memang mencerminkan keunggulan kepemimpinannya. Xi Jinping telah mengkonsolidasikan kekuasaannya di China dan diakui sebagai sosok pemimpin paling kuat sejak Mao Zedong dan Deng Xiaoping. Kepemimpinannya yang kuat telah memberikan dampak besar pada politik domestik dan luar negeri China.

Rekonsiliasi antara Arab Saudi dan Iran di Beijing merupakan sebuah kejutan besar karena kedua negara tersebut telah lama menjadi musuh bebuyutan dan terlibat dalam konflik politik, militer, dan intelijen di berbagai wilayah seperti Yaman, Irak, Suriah, Lebanon, dan Afrika. Mediasi China dalam rekonsiliasi ini menunjukkan kemampuan China sebagai mediator yang efektif dalam menghadapi konflik yang kompleks (Sahriatinia, 2011).

Pentingnya rekonsiliasi Arab Saudi-Iran di Beijing juga terlihat dari perspektif geopolitik. Negara-negara Arab Teluk semakin merasakan perlambatan pengaruh Amerika Serikat di kawasan tersebut. Walaupun Amerika Serikat telah lama menjadi pemain kunci dalam politik Timur Tengah, persepsi ini mulai bergeser dengan kehadiran China yang semakin meningkat. China berhasil merajut perdamaian di kawasan yang sebelumnya terkenal dengan konflik dan persaingan geopolitik.

Beberapa faktor yang memungkinkan keberhasilan mediasi China antara Arab Saudi dan Iran adalah kesediaan kedua negara untuk mengesampingkan perbedaan mereka dan mencari titik tengah yang memfasilitasi peran China sebagai mediator. Selain itu, kekuatan ekonomi China dan ketergantungan Arab Saudi pada minyak turut memainkan peran penting dalam mencapai kesepakatan rekonsiliasi tersebut.

Rekonsiliasi Arab Saudi-Iran di Beijing juga dianggap sebagai keberhasilan diplomasi China dan menandai pergeseran kekuatan geopolitik di Timur Tengah. Semakin banyak negara Arab yang melihat bahwa pengaruh Amerika Serikat di kawasan tersebut semakin menurun, sedangkan China muncul sebagai kekuatan yang dapat menawarkan perdamaian dan stabilitas tanpa imbalan politik yang rumit.

Peran China sebagai mediator dalam rekonsiliasi ini menunjukkan bahwa China telah memperoleh pengaruh yang signifikan di Timur Tengah dan dapat memainkan peran penting dalam politik kawasan tersebut. Pengaruh ekonomi China yang semakin kuat dan hubungan perdagangan yang berkembang dengan negara-negara Timur Tengah, termasuk Arab Saudi, memberikan landasan yang kuat bagi China dalam memperkuat posisinya sebagai pemain kunci di kawasan tersebut (Garlick & Havlová, 2020).

Kesepakatan rekonsiliasi Arab Saudi-Iran melalui mediasi China juga menggambarkan perubahan dinamika kekuasaan di Timur Tengah. Amerika Serikat tidak lagi memiliki pengaruh yang sama seperti beberapa dekade yang lalu, dan kekuatan ekonomi dan diplomasi China semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa Arab Saudi dan negara-negara lain di kawasan mulai melihat China sebagai mitra yang penting dalam mengatasi tantangan politik dan keamanan di Timur Tengah (Garlick & Havlová, 2020).

Dengan adanya rekonsiliasi ini, China telah berhasil memperluas pengaruhnya di Timur Tengah dan menjadi pemain kunci dalam upaya menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan yang memiliki tradisi konflik yang kompleks. Rekonsiliasi Arab Saudi-Iran di Beijing menunjukkan bahwa China dapat memainkan peran yang signifikan dalam diplomasi global dan menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan dalam politik dunia.

Hubungan antara China dan Arab Saudi memang semakin menarik untuk diperhatikan, terutama karena Arab Saudi memiliki hubungan historis yang kuat dengan Amerika Serikat. Ada dua faktor penting yang menjalin hubungan historis antara AS dan Arab Saudi. Pertama, pada tahun 1945, terjadi kesepakatan keamanan dan imbalan minyak antara Arab Saudi dan AS. Kesepakatan ini tercapai antara Raja Arab Saudi Abdul Aziz dan Presiden AS Franklin D. Roosevelt di atas kapal perang USS Murphy di Terusan Suez, Mesir. Kesepakatan tersebut menghasilkan komitmen AS untuk menjamin keamanan Arab Saudi, sementara Arab Saudi menjamin suplai minyak ke AS. Kedua, persaingan antara AS dan China semakin memanas di berbagai belahan dunia, termasuk di Arab Saudi. AS merasa kurang nyaman dengan kekuatan dan pengaruh China yang semakin meningkat di Arab Saudi dan negara-

negara lainnya. Hal ini mencerminkan adanya persaingan geopolitik antara AS dan China di kawasan tersebut. Pada tahun 2022, baik Presiden AS maupun Presiden China mengunjungi Arab Saudi, menunjukkan betapa pentingnya negara tersebut bagi kedua kekuatan tersebut. Namun, AS tidak mungkin mengusir China dari Arab Saudi, dan harus menerima bahwa geopolitik dan ekonomi telah berubah secara signifikan. Arab Saudi juga harus mengakui bahwa hubungannya dengan AS juga telah berubah. Perubahan geopolitik dan ekonomi tersebut semakin memperkuat hubungan antara China dan Arab Saudi. AS perlu menerima kenyataan bahwa China adalah pesaingnya di Arab Saudi, sementara Arab Saudi harus menjaga hubungan dengan kedua negara tersebut. Arab Saudi masih membutuhkan AS dalam hal keamanan, karena sebagian besar persenjataan mereka masih dipasok oleh AS, dan AS juga memiliki pangkalan militer di kawasan Arab.

Namun, kepentingan ekonomi Arab Saudi semakin terfokus pada China daripada AS. Perdagangan terbesar Arab Saudi saat ini adalah dengan Asia Timur, terutama China. Ekspor minyak Arab Saudi juga lebih banyak diarahkan ke Asia Timur, dengan China menjadi importir terbesar minyak dari Arab Saudi (Garlick & Havlová, 2020).

Pada tahun 2021, impor Arab Saudi dari China mencapai sekitar 20% dari total impor Arab Saudi dari seluruh dunia. Angka ini menunjukkan bahwa China telah menjadi pemasok yang semakin penting bagi Arab Saudi. Sementara itu, impor Arab Saudi dari Amerika Serikat hanya mencapai sekitar 10% dari total impor mereka. Salah satu faktor yang mendukung meningkatnya impor Arab Saudi dari China adalah kebutuhan Arab Saudi terhadap produk-produk manufaktur, termasuk mesin dan peralatan industri, elektronik, serta barang konsumsi lainnya. China memiliki kapasitas produksi yang besar dan harga yang kompetitif, sehingga dapat memenuhi kebutuhan Arab Saudi dengan lebih efisien.

Selain itu, hubungan perdagangan yang positif antara Arab Saudi dan China juga tercermin dalam neraca perdagangan yang menguntungkan bagi China. Pada tahun 2021, nilai perdagangan antara kedua negara mencapai sekitar 67 miliar dolar AS. Angka ini menunjukkan adanya keuntungan ekonomi yang signifikan bagi China dari hubungan dagang dengan Arab Saudi.

Peran China dalam konteks konflik antara Arab Saudi dan Iran juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Dengan kekuatan ekonominya yang terus berkembang, China memiliki potensi untuk mempengaruhi dinamika politik di kawasan Timur Tengah. Hal ini dapat memengaruhi peran Amerika Serikat dan kepentingannya di wilayah tersebut. Meningkatnya impor Arab Saudi dari China menunjukkan adanya hubungan perdagangan yang kuat antara kedua negara. Ketergantungan Arab Saudi terhadap impor dari China dan neraca perdagangan yang positif bagi China menunjukkan pentingnya China dalam konteks ekonomi dan politik di Timur Tengah. Faktor-faktor ini perlu dipertimbangkan dalam memahami dinamika hubungan antara Arab Saudi, China, dan Amerika Serikat.

Dengan adanya pergeseran ini, hubungan antara China dan Arab Saudi menjadi semakin penting dan menarik dalam konteks geopolitik dan ekonomi global (Anderson, 2013). Arab Saudi mengakui pentingnya hubungan dengan AS dalam hal keamanan, namun kepentingan ekonomi mereka lebih terfokus pada China. Hal ini mencerminkan perubahan dinamika kekuasaan di Timur Tengah dan mendorong China untuk menjadi pemain kunci di kawasan tersebut.

Pentingnya pergeseran ini antara China dan Arab Saudi terletak pada dampaknya dalam konteks geopolitik dan ekonomi global. Pertama, meningkatnya impor Arab Saudi dari China menunjukkan posisi dominan China dalam memenuhi kebutuhan ekonomi Arab Saudi. Hal ini menggambarkan kekuatan ekonomi China dan kemampuannya untuk memengaruhi perdagangan global. Selain itu, sebagai salah satu produsen minyak terbesar di dunia, Arab Saudi memiliki kepentingan besar dalam menjaga dan memperluas pasar ekspor minyaknya. Dengan semakin bergantungnya Arab Saudi pada pasar China, ini memberikan China kekuatan tawar yang lebih besar dalam hubungan bilateral mereka.

Kedua, pergeseran ini juga memiliki dampak penting dalam dinamika politik dan ekonomi di Timur Tengah. Dengan hubungan yang semakin kuat antara China dan Arab Saudi, China dapat memainkan peran yang lebih besar dalam wilayah ini yang kaya akan sumber daya energi. Ini berpotensi mengubah pengaruh politik dan ekonomi di kawasan

tersebut serta dapat menantang kehadiran dan kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah. Dengan demikian, pergeseran ini memperkuat posisi China sebagai aktor utama dalam geopolitik global dan memberikan tantangan baru bagi kekuatan tradisional di kawasan tersebut.

Tiga Negara Produsen Minyak Teratas

Produksi harian rata-rata per bulan



Sumber: Jodi Oil



Dalam upaya mendiversifikasi ekonomi, Arab Saudi telah menjalin kerja sama ekonomi yang erat dengan China. Mereka telah meningkatkan kerja sama dalam berbagai sektor, termasuk energi, infrastruktur, teknologi, dan pariwisata. Investasi China di Arab Saudi telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dan Arab Saudi secara aktif mencari peluang untuk menarik investasi lebih lanjut dari China. Selain itu, Arab Saudi juga telah meluncurkan proyek-proyek mega yang melibatkan partisipasi China, seperti pembangunan kota cerdas Neom dan Zona Ekonomi Khusus Red Sea.

China juga menjadi pasar yang penting bagi Arab Saudi. Negara tersebut merupakan salah satu konsumen minyak terbesar di dunia, dan Arab Saudi merupakan salah satu produsen minyak terbesar. Arab Saudi secara terus-menerus meningkatkan ekspor minyaknya ke China untuk memenuhi permintaan energi yang terus tumbuh di negara tersebut. Selain itu, Arab Saudi juga memperluas ekspor produk non-minyaknya ke China, termasuk produk petrokimia, baja, dan bahan makanan. Ini memberikan peluang bagi Arab Saudi untuk mengurangi ketergantungan pada pendapatan minyak dan meningkatkan kerja sama ekonomi dengan China.

Selain kerja sama ekonomi, Arab Saudi juga mengintensifkan hubungan diplomatik dan budaya dengan China. Kedua negara telah melakukan kunjungan tingkat tinggi dan pertukaran delegasi untuk memperkuat hubungan bilateral. Arab Saudi telah menjadi salah satu negara Arab pertama yang menyambut inisiatif "One Belt, One Road" yang digagas oleh China. Inisiatif ini bertujuan untuk membangun jaringan perdagangan dan konektivitas yang melintasi berbagai benua. Arab Saudi juga aktif dalam mempromosikan budaya Arab di China, termasuk melalui festival, pertunjukan seni, dan kerjasama akademik. Semua upaya ini bertujuan untuk memperkuat hubungan antara Arab Saudi dan China dalam berbagai bidang, baik ekonomi, politik, maupun budaya (Duan & Aldamer, 2022).

Dengan demikian, hubungan antara Arab Saudi dan China telah berkembang menjadi kemitraan strategis yang melibatkan kerja sama ekonomi yang kuat, kerjasama energi, dan hubungan diplomatik yang intensif. Arab Saudi mengakui pentingnya Asia Timur, terutama China, sebagai mitra utama dalam mendukung diversifikasi ekonomi dan mencapai tujuan

Visi Arab Saudi 2030. Sementara itu, China juga melihat Arab Saudi sebagai mitra strategis dalam mengamankan pasokan energi dan memperluas pengaruhnya di Timur Tengah.

2. Dominasi Aspek Ekonomi

Di dalam konteks industri minyak, Arab Saudi menjadi pemilik ancaman strategis. Para pakar strategi mendefinisikan ancaman strategis sebagai senjata atau alat yang sangat kuat sehingga dapat membuat pihak lain berpikir dua kali untuk terlibat dalam konflik dengan pemilik senjata tersebut. Nuklir adalah contoh senjata strategis yang umum dikenal. Hingga saat ini, belum terjadi pertempuran atau perang antara negara-negara yang memiliki senjata nuklir (Duan & Aldamer, 2022).

Dalam hal ini, Arab Saudi memiliki kekuatan yang strategis dalam industri minyak. Arab Saudi merupakan salah satu produsen minyak terbesar di dunia dan memiliki cadangan minyak yang sangat besar. Dengan kekuatan ini, mereka memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pasar minyak global dan dapat menggunakan minyak sebagai alat dalam politik dan diplomasi internasional. Karena ketergantungan dunia terhadap minyak, Arab Saudi menjadi pemain penting yang dapat mempengaruhi kebijakan energi dan ekonomi global.

Selain itu, sebagai pemilik kekuatan strategis dalam industri minyak, Arab Saudi juga memiliki kemampuan untuk mempengaruhi stabilitas keamanan global. Gangguan besar dalam pasokan minyak dari Arab Saudi dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan gejolak politik di banyak negara yang bergantung pada impor minyak mereka. Oleh karena itu, Arab Saudi memiliki kekuatan untuk mempengaruhi dinamika geopolitik dan mendapatkan perhatian serta kewaspadaan dari negara-negara lain.

Dalam konteks ini, Arab Saudi memegang peran yang strategis dan memiliki kekuatan yang signifikan dalam industri minyak. Keberadaan mereka sebagai pemilik ancaman strategis dapat membentuk keputusan dan strategi negara lain terkait dengan minyak dan stabilitas global.

Dalam konteks hukum Islam, industri minyak dan peran Arab Saudi sebagai pemilik kekuatan strategis dapat memiliki beberapa implikasi. Kepemilikan Sumber Daya Alam: Hukum Islam mengajarkan bahwa sumber daya alam adalah milik bersama umat manusia dan Allah sebagai Pemilik sejati. Oleh karena itu, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, termasuk minyak, harus dilakukan dengan adil dan berkeadilan. Dalam hal ini, Arab Saudi sebagai pemilik cadangan minyak yang besar memiliki tanggung jawab untuk memanfaatkan sumber daya ini dengan bijaksana, melindungi lingkungan, serta memastikan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara adil (Duan & Aldamer, 2022).

Dampak Sosial dan Ekonomi: Kekuatan dan pengaruh Arab Saudi dalam industri minyak dapat memberikan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan, baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional. Dalam konteks ini, hukum Islam mendorong penggunaan kekayaan dan kekuasaan untuk kemakmuran umat dan kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, Arab Saudi memiliki tanggung jawab untuk menggunakan sumber daya dan pengaruhnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperjuangkan keadilan sosial, serta mengurangi kesenjangan ekonomi antara kelompok masyarakat.

Kebijakan Energi dan Ekonomi: Hukum Islam mendorong adanya kebijakan energi dan ekonomi yang adil dan berkeadilan. Dalam hal ini, Arab Saudi sebagai produsen minyak terbesar di dunia memiliki tanggung jawab untuk menjalankan kebijakan yang memperhatikan kepentingan umum dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Hal ini mencakup pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri, menjaga stabilitas harga minyak global yang wajar, serta memperjuangkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Dalam praktiknya, Arab Saudi telah mengambil langkah-langkah untuk mengaitkan industri minyak dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Misalnya, melalui program Vision 2030, Arab Saudi berusaha untuk mencapai diversifikasi ekonomi, mengurangi ketergantungan pada minyak, serta mendorong inovasi dan pembangunan berkelanjutan.

Tujuan ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang mendorong pemanfaatan sumber daya dengan bijaksana dan mengutamakan kemaslahatan bersama (Duan & Aldamer, 2022).

Dalam Al-Quran, terdapat beberapa ayat yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, termasuk minyak, dan tanggung jawab pemilik ancaman strategis seperti Arab Saudi. Meskipun tidak ada ayat yang secara spesifik menyebutkan minyak atau Arab Saudi, prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Quran dapat menjadi pedoman dalam konteks ini. Berikut adalah beberapa ayat yang relevan:

Kepemilikan dan pengelolaan sumber daya alam: "Allah menjadikan segala yang ada di bumi ini untuk kamu. Maka berjalan-jalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akhir (kehidupan) orang-orang yang mendustakan (ayat-ayat Allah)." (QS. Al-Mulk: 15). Ayat ini menekankan bahwa Allah menjadikan segala sesuatu di bumi ini untuk kepentingan umat manusia. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam, termasuk minyak, harus dilakukan dengan kebijaksanaan dan mempertimbangkan manfaat jangka panjang bagi manusia dan lingkungan.

Keadilan dan kemaslahatan bersama: "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri, atau ibu-bapak dan kaum kerabatmu." (QS. An-Nisa: 135). Ayat ini menekankan pentingnya keadilan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pemanfaatan sumber daya alam. Pemilik ancaman strategis seperti Arab Saudi memiliki tanggung jawab untuk memastikan keadilan dalam distribusi manfaat dari pengelolaan minyak, serta memperjuangkan kemaslahatan bersama bagi masyarakat.

Penggunaan kekayaan untuk kemaslahatan umat: "Dan mereka disuruh memberi (belanja) dengan apa yang telah Kami rezekikan kepada mereka." (QS. Al-Baqarah: 3). Ayat ini mengingatkan umat Muslim untuk menggunakan kekayaan dan sumber daya yang telah diberikan Allah dengan cara yang bermanfaat bagi umat manusia secara keseluruhan. Pemilik ancaman strategis memiliki tanggung jawab untuk menggunakan kekayaan dan pengaruh mereka dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperjuangkan kemaslahatan umum. Dalam rangka mengaitkan prinsip-prinsip Al-Quran dengan pengelolaan minyak dan peran Arab Saudi sebagai pemilik ancaman strategis, penting bagi Arab Saudi untuk memperhatikan prinsip-prinsip hukum Islam yang menekankan keadilan, kemaslahatan bersama, dan penggunaan kekayaan yang bijaksana. Hal ini melibatkan kebijakan yang adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan.

3. Konvergensi Kepentingan

Rivalitas Saudi dan Iran juga menjadi variabel penting dalam melihat berbagai konflik di Timur Tengah. Penyelesaian masalah Irak, Suriah, Lebanon, ataupun Yaman, semua berpangkal pada perbedaan posisi antara Saudi dan Iran. Hal yang kemudian menjadi pertanyaan ialah apakah normalisasi hubungan diplomatik kedua negara akan diikuti dengan konvergensi kepentingan keduanya dalam konflik-konflik di kawasan Timur Tengah yang kemudian bermuara pada kestabilan kawasan.

Jawaban dari pertanyaan tersebut dapat dilihat dengan memahami logika normalisasi dari dua dimensi. Pertama pemutusan hubungan diplomatik antara Saudi dan Iran terjadi tahun 2016 akibat krisis diplomatik pascaeksekusi ulama Syiah Saudi yang menimbulkan protes di Teheran dan menyasar Kedutaan Besar Saudi. Meski demikian, perbedaan posisi politik kedua negara di kawasan Timur Tengah sudah berlangsung sejak era 1980-an. Bahkan, saat itu, Saudi sampai pada taraf memberikan bantuan logistik perang kepada Irak dalam perang Irak-Iran untuk mencegah apa yang disebut sebagai "ekspansi Syiah" (Duan & Aldamer, 2022).

Kemudian selama Musim Semi Arab, hubungan kedua negara bertambah renggang sebagai akibat perbedaan posisi mereka dalam menyikapi gelombang perubahan. Keduanya berseteru di Bahrain dan juga Suriah, hingga pada titik keduanya menggerakkan proksi mereka untuk bertarung di lapangan (Duan & Aldamer, 2022).

Artinya, ada atau tidaknya hubungan diplomatik tak menunjukkan bahwa permusuhan kedua negara itu menghilang atau berkurang. Kedua dimensi ini, ada dua hal yang harus dilihat. Hal pertama adalah dinamika dalam hubungan China dan Saudi. Untuk memahami hubungan keduanya, kita perlu melihat pada aspek ekonomi dalam hubungan keduanya. Dalam berbagai pertemuan, pejabat tinggi kedua negara tampak bahwa agenda ekonomi merupakan agenda yang menjadi prioritas utama.

Fokus utama mereka ada pada isu perdagangan dan energi. Saudi yang sedang mengalami stagnasi ekonomi membutuhkan China untuk mendorong kembali perekonomiannya. Yang menarik, China mampu melakukan hal tersebut, mengembangkan hubungan ekonomi secara maksimal, tanpa melibatkan diri dalam berbagai konflik yang dilakukan Saudi. Artinya, pendekatan China dalam hubungan dengan Saudi, dan dengan kawasan Timur Tengah secara lebih luas, *yes to economic cooperation, but no to politics*. Catatan untuk memahami perilaku Saudi, hubungan yang mereka bangun dengan China tak dilakukan dengan mengorbankan hubungan dengan AS. Kedua yang harus dipertimbangkan adalah hubungan Iran dengan China. China merupakan satu dari sedikit negara yang tetap membangun hubungan ekonomi yang kuat dengan Iran di tengah sanksi yang diberikan kepada negara tersebut. Sejak sebelum penandatanganan JCPOA, yang membuat sanksi perdagangan migas dicabut, China sudah menjadi konsumen utama migas Iran.

Saudi memang memiliki beberapa keberatan terhadap kebijakan AS, terutama dalam kasus pembunuhan Jamal Khashoggi, di mana AS menuduh keterlibatan Pangeran Mohammed bin Salman (MBS) dalam kasus tersebut. Namun, Saudi tetap memiliki ketergantungan secara keamanan terhadap AS dan tetap membutuhkan finalisasi penjualan senjata-senjata terbaru dari negara tersebut (Duan & Aldamer, 2022).

China juga memberikan persetujuan atas resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB mengenai sanksi yang diterapkan terhadap Iran. Dalam konteks tersebut, tampak bahwa sebenarnya perilaku China dalam hubungan dengan Iran juga didorong oleh logika ekonomi, meski harus diakui bahwa kedua negara tersebut sama-sama tidak nyaman dengan kebijakan-kebijakan AS.

Dengan mempertimbangkan kedua hal ini, tampak bahwa baik China, Iran, maupun Saudi masing-masing bergerak dengan kepentingan mereka sendiri dalam normalisasi tersebut. Mereka mengedepankan keuntungan dari kedekatan hubungan ekonomi yang melebihi biaya normalisasi yang harus dikeluarkan tiap-tiap pihak. China tetap mendapatkan akses terhadap sumber energi dan melakukan perluasan pasar di kawasan Timur Tengah, sementara Saudi dan Iran mendapatkan keuntungan finansial dari kedekatan ekonomi mereka dengan China. Iran tak perlu mempertimbangkan faktor AS dan bahkan mendapatkan keuntungan karena mereka dan China sama-sama tak suka dengan kebijakan AS, sedangkan Saudi melakukannya tanpa membakar hubungan politik mereka dengan AS. Namun, keuntungan itu tak membuat Saudi dan Iran memiliki konvergensi kepentingan dalam konflik-konflik di kawasan timur tengah. Di Irak, Suriah, Lebanon, dan Yaman, kedua negara tetap terlibat dalam perebutan pengaruh politik untuk memastikan negara-negara berada dalam mereka. Dengan China tidak masuk ke ranah itu, pada dasarnya normalisasi tersebut hanya akan setara fungsinya dengan kondisi pra-2016.

Dian Wirengjurit, *Analisis Geopolitik dan Hubungan Internasional*, Duta Besar RI untuk Iran (2012-2016) mengatakan kesepakatan Iran-Saudi bukan hanya tentang memudarnya pengaruh AS di Timur Tengah, melainkan juga tentang perubahan mendasar dalam geopolitik kawasan. Diplomasi Iran-Saudi tampaknya akan menjadi "bola salju" di Timur Tengah. Bagi Iran perdamaian sangat penting, saat ekonominya jatuh akibat sanksi Barat dan mandeknya perundingan nuklir (Joint Comprehensive Plan of Action/JCPOA) (Mirza et al., 2022).

Kemenangan diplomatik China juga dinilai merupakan bagian dari upaya untuk mengurangi manuver politik AS di kawasan, diimbangi juga dengan membantu Iran mengatasi sanksi ekonomi. Bagi Saudi dengan Iran akan mendorong penyelesaian konflik di berbagai wilayah dan penting bagi keamanan nasionalnya, terutama di Yaman dan Suriah. Kesepakatan Beijing juga akan membuka pintu dalam diversifikasi kemitraan

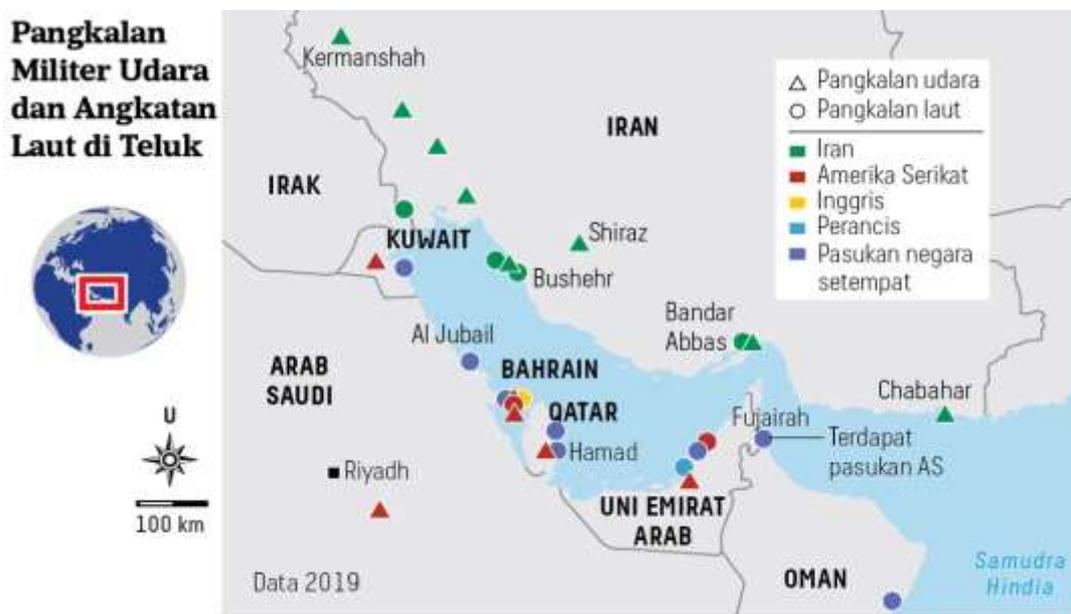
ekonomi dan keamanan, khususnya ketika dunia akan memasuki masa pasca-hidrokarbon (migas).

Dengan peredaan ketegangan ini, Riyadh bisa lebih fokus pada program implementasi Visi 2030, yang akan menjadikan Saudi hub ekonomi, keuangan, dan turisme kawasan dan internasional. Sementara bagi China—sebagai mitra dagang terbesar, bahkan dibandingkan dengan AS dan Uni Eropa sekaligus—kesepakatan ini memberikan peluang untuk melanjutkan pembangunan pabrik rudal dan kapabilitas militer Saudi. Selama ini AS memberi jaminan keamanan pada Saudi dari ancaman Iran dengan mengembangkan program nuklir sipil dan mengurangi pembatasan penjualan senjatanya. Kesepakatan Beijing akan melindungi Saudi dari kemungkinan dampak serangan Israel terhadap fasilitas nuklir Iran dan memupus niat Tel Aviv untuk membentuk aliansi kawasan menghadapi Iran. Dan di bidang energi yang amat strategis, Iran dan Saudi sebagai dua negara yang paling berpengaruh akan dapat lebih mudah mengendalikan OPEC, mencegah fluktuasi harga yang tidak terkendali (Ansari, 2017).

Rekonsiliasi Arab Saudi-Iran tak hanya bisa mengubah peta geopolitik-keamanan di Timur Tengah, tetapi juga bisa menghentikan konflik di sejumlah negara yang mengubah peta Timur Tengah. Saudi-Iran bahkan juga sepakat menghidupkan lagi kesepakatan keamanan kedua negara yang ditandatangani pada 2001, kerja sama ekonomi, investasi, budaya, olahraga, serta kepemudaan dan teknologi yang disepakati tahun 1998.

Rekonsiliasi Arab Saudi-Iran itu tentu akan mengubah secara signifikan peta geopolitik dan keamanan di Timur Tengah saat ini dan saat mendatang. Wujud dari perubahan tersebut, antara lain, adalah akan semakin dekatnya pewujudan aspirasi Iran tentang konsep keamanan di kawasan Teluk Persia yang harus dikontrol oleh negara-negara kawasan Teluk Persia sendiri.

Konsep keamanan Iran ini bertujuan mengurangi peran dan kehadiran militer asing, khususnya militer AS di kawasan teluk Persia (Ansari, 2017).



4. Kesimpulan

Peran AS pada gilirannya tidak diperlukan lagi di kawasan Teluk Persia. Kehadiran berbagai pangkalan militer AS di kawasan itu selama tiga dekade terakhir, persisnya sejak invasi Irak ke Kuwait tahun 1990, adalah untuk menangkal bahaya ancaman rezim Saddam Hussein di Irak dan ancaman rezim Mullah di Iran.

Namun, negara-negara Arab Teluk masih ketakutan terhadap ancaman Iran yang jadi dasar alasan terus bertahannya berbagai pangkalan AS di negara-negara Arab Teluk sampai

saat ini. Pascarekonsiliasi Arab Saudi-Iran seharusnya ketakutan itu akan sirna. Akan menjadi kejutan besar kelak jika rekonsiliasi Arab Saudi-Iran disusul oleh terwujudnya konsep keamanan Iran di kawasan Teluk Persia ini tidak mudah karena akan ditentang oleh AS dan Israel. AS dan Israel akan berusaha dengan segala cara agar konsep keamanan Iran tidak terwujud di Teluk Persia. Tentu ini juga yang membuat posisi Arab Saudi akan menjadi sulit. Bagaimana pun, Arab Saudi harus menjaga hubungan baik dengan AS. Ini tantangan tersendiri bagi Riyadh. Arab Saudi harus bermain cantik di banyak kaki: AS, China, dan Iran.

Ucapan Terimakasih

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada setiap yang terlibat dalam penerbitan artikel ini.

Kontribusi Penulis

Seluruh tahapan penulisan artikel penelitian ini ditulis oleh Trisia Megawati Kusuma Dewi sebagai penulis tunggal.

Pendanaan

Penelitian ini tidak menerima dana eksternal.

Pernyataan Dewan Peninjau Etis:

Tinjauan etis dan persetujuan dibebaskan untuk penelitian ini karena tidak ada data pribadi yang dikumpulkan dalam penelitian ini yang merupakan kajian literatur.

Pernyataan Ketersediaan Data:

Data tersedia berdasarkan permintaan.

Konflik Kepentingan:

Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan dalam penulisan artikel penelitian ini.

Referensi

- Abdillah, M. (2021). *Islam Agama Kedamaian: Merawat Kemajemukan dan Kerukunan di Indonesia*. Kompas Media Nusantara. https://perpustakaan.kemendagri.go.id/opac/index.php?p=show_detail&id=6742
- Anderson, E. (2013). *Middle East*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315003160>
- Ansari, D. (2017). OPEC, Saudi Arabia, and the shale revolution: Insights from equilibrium modelling and oil politics. *Energy Policy*, 111, 166–178. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2017.09.010>
- Duan, X., & Aldamer, S. (2022). The Saudi Arabia–China relationship at a crossroad: A neoclassical realist analysis. *Asian Politics & Policy*, 14(1), 114–128. <https://doi.org/10.1111/aspp.12619>
- Garlick, J., & Havlová, R. (2020). China's "Belt and Road" Economic Diplomacy in the Persian Gulf: Strategic Hedging amidst Saudi–Iranian Regional Rivalry. *Journal of Current Chinese Affairs*, 49(1), 82–105. <https://doi.org/10.1177/1868102619898706>
- Mirza, M. N., Abbas, H., & Waisrani, I. H. (2022). The Iranian Nuclear Programme: Dynamics of Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), American Unisolationism and European Apprehensions. *Journal of European Studies*, 38(01), 14–32. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4002492
- Sahriatinia, M. (2011). Iran-China Relations: An Overview of Critical Factors. *Iranian Review of Foreign Affairs*, 1(4), 57–85. <https://doi.org/Iran-China Relations: An Overview of Critical Factors>